BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi Menurut Bahasa dan Istilah

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carringout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

(https://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB%20III.pdf)

2. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

*There are two definitions of implementation. First, implementation leads to activities, actions, or the existence of a systematic mechanism; implementation is more than just an activity; it is an activity that is planned and designed to achieve the activity's goals (*Y. Sofia, 2022, h.1). *Second, implementation is the execution or application of any plan, method or design, idea, model, specification, standard, or policy for accomplishing something. Thus, implementation is an action that must occur after the initial thought in order for something to occur.* (Ehrens, 2015, h.2).

Implementation is the execution or practice of a plan, a method or any design, idea, model, specification, standard or policy for doing something. As such, implementation is the action that must follow any preliminary thinking for something to actually happen. (Ben Lutkevich 2022, h. 3).

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. (Mulyadi, 2015, h.12).

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
c. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones: *"Those Activities directed toward putting a program into effect"* (proses program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter*: "Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set*

forth in prior policy" (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Mulyadi, 2015, h.45).

Selanjutnya menurut Lister,"sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan". (Taufik dan Isril, 2013, h.136).

Grindle menyatakan "implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu". (Mulyadi, 2015, h.47).

Sedangkan Horn mengartikan "implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan". (Tahir, 2014, h.55).

Ekawati menyatakan, "bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya". (Taufik dan Isril, 2013, h.136).

Kemudian Gordon menyatakan, "implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. (Mulyadi, 2015, h.24). Menurut Widodo "implementasi berarti menyediakan sarana untuk

melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu". (Syahida, 2014, h.10).

Dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. (Naditya dkk, 2013 h.1088).

Sedangkan menurut Wahyu, studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. (Mulyadi, 2015, h.50).

Kemudian Gunn dan Hoogwood mengemukakan, "bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial". (Tahir, 2014, h.55).

Menurut Meter and Horn menekankan, "bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati". (Taufik dan Isril, 2013, h.136).

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky, mengemukakan bahwa: *"Implementation as to carry out, acoumplish, fulfill, produce, complete"* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan,

melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil". (Syahida, 2014, h.8-9).

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk "merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang". (Pratama, 2015, h.229).

Sedangkan William, "dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan". (Taufik dan Isril, 2013, h.136).

Menurut Mazmanian dan Sebatier, menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. (Waluyo, 2007, h.49).

Kemudian menurut Webster Dictionary, mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: "Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *"implementation",* berasal dari kata kerja *"to implement",* kata to implement berasal dari bahasa latin "implementatum" dari asal kata *"impere"* dimaksudkan *"to fill up", "to fill in"* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *"plere"* maksudnya *"to fill",* yaitu mengisi. Selanjutnya kata *"to implement"* dimaksudkan sebagai*: "(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement*. Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. (Syahida, 2014, h.8).

Salusu menyatakan, "implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah". (Tahir, 2014, h.55-56).

Selanjutnya (Kapioru, 2014, h.105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a. Kondisi lingkungan *(environmental conditions).*
b. Hubungan antar organisasi *(inter-organizational relationship).*

c. Sumber daya *(resources).*
d. Karakter institusi implementor *(characteristic implementing agencies).*

Purwanto (Syahida, 2014, h.13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

(https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf).

B. Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Secara harfiah, kurikulum dalam bahasa Inggris "*curriculum*". Berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *"currir"* dan *"curere"* (*curir* artinya pelari dan *curere* artinya *"to run"* tempat berlari). Istilah tersebut digunakan dalam bidang olahraga yang artinya bahwa kurikulum sebagai jarak yang harus ditempuh dari *"start"* sampai *"finish"* oleh para pelari pacuan kuda untuk mendapatkan medali atau penghargaan (Jane sick, 2003, h.1). Terkait pengertian kurikulum secara harfiah diantaranya menurut (Philips, 2008, h.2) *"Curiculum as chariots raced".* Dan menurut kurikulum berarti "*a path to run in small steps"*. Yaitu jalan kecil atau berupa trotoar yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. (Jacobs, 2010, h.3).

Memperhatikan makna kurikulum secara harfiah menurut (Elis, 2004, h.5) kata kurikulum dalam dunia pendidikan merupakan suatu metafora yang mengambil makna kiasan dari arti harfiahnya. Mengacu pada pengertian secara harfiah, kemudian para ahli pendidikan dan ahli kurikulum menerapkannya dalam bidang pendidikan, sehingga muncul pengertian bahwa kurikulum adalah suatu arena tempat para peserta didik bertanding untuk menguasai sejumlah mata pelajaran dalam rangka memperoleh diploma, ijazah, atau gelar kesarjanaan.

Pengertian kurikulum tersebut termasuk pengertian kurikulum tradisional atau termasuk pengertian kurikulum yang sempit atau dengan kata lain terlalu sederhana, mengingat peserta didik di sekolah tidak hanya mempelajari sejumlah materi pelajaran saja tetapi segala hal yang dapat dilihat, didengar, dan dilakukan peserta didik selama berada di bawah bimbingan guru dan sekolah. Karena itu, pengertian tersebut banyak ditentang oleh para ahli pendidikan, mengingat peserta didik belajar di sekolah tidak hanya mempelajari materi dari sejumlah mata pelajaran saja tetapi banyak hal yang dapat dipelajari peserta didik dalam rangka membentuk dan mengembangkan kepribadiannya (Zais, 1976, h.6).

"Curriculum is often one of the main concerns in the educational field. What kind of curricula should we offer to learners? Educators and teachers are concerned about what choices are to make about teaching content and methods. As for the parents, they would like to know what their children are going to learn. Learners are also concerned about what kinds of content they are going to have in class. "Curriculum" seems to be considered greatly as what teachers are going to teach and, in other words, what learners are going to learn. In fact, "curriculum" is also closely related to how well the learners learn—the outcomes. Thus, as an umbrella term, "curriculum" includes a lot of issues, for example, teaching curriculum, learning curriculum, testing curriculum, administrative curriculum and the hidden curriculum. This paper presents relevant literature associated with

the term "curriculum" to help clarify what is the entity that we need to be concerned about in the school context". (Shao-Wen Su, 2012, h.1).

"With the expansion of formal education in almost all societies around the world an appropriate and suitable definition of the term 'curriculum' has become increasingly essential and necessary. However, rather than achieving consensus and thereby enhancing a clear educational focus, literature reveals continued differentiation and disputation as to an acceptable definition of the term. Apparently, despite its recent common usage and development of study areas in the curriculum field, the term has a long history which dates as far back as the ages of education writers such as Plato, Aristotle, J. A. Comenious, Bobbit and Fredrich Froebel (Print, 1993). (Mutale Mulenga, 2018, h.2).

2. Teori Pengembangan Kurikulum

"Curriculum theory (CT) is an academic discipline devoted to examining and shaping educational curricula. There are many interpretations of CT, being as narrow as the dynamics of the learning process of one child in a classroom to the lifelong learning path an individual takes. CT can be approached from the educational, philosophical, psychological and sociological perspectives". (Wikipedia, 2010, h.1).

Kurikulum dibuat untuk menyiapkan lulusan yang mampu hidup di masyarakat maka kurikulum tidak mungkin statis melainkan harus dinamis mengikuti kebutuhan masayarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Oleh karenanya kurikulum perlu di revisi dan di adaptasikan dengan kemajuan jaman, agar para lulusan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari sekolah untuk kehidupannya.

Sejak abad ke-15 (lima belas) sampai abad ke-20 (dua puluh) para ahli bidang pendidikan telah memikirkan bagaimana tahapan kurikulum dikembangkan. Secara umum pengembangan kurikulum oleh para ahli pendidikan dikembangkan melalui empat tahap, yaitu:

a. penyusunan rancangan,
b. perencanaan,
c. pelaksanaan, dan
d. evaluasi.

Berikut dibawah ini diantaranya para ahli pendidikan yang mengemukakan teori tentang pengembangan kurikulum :

a. *Johann Amos Comenius (1592)*

   Comenius mengemukakan teori untuk mengajar yang dikenal dengan nama *Didactica Magna* artinya "didaktik besar" yang berisi teori-teori tentang bagaimana cara mengajar agar dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik.

b. *Ralp Tyler (1949)*

   Dalam sebuah bukunya yang berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction*, Ralp Tayler mengemukakan adanya 4 (empat) tahapan dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

1) Menentukan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan yang akan dilakukan.
2) Menentukan pilihan bentuk proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan yang sudah di rumuskan.
3) Menentukan pengaturan atau organisasi materi kurikulum, disesuaikan dengan bentuk proses yang akan dilakukan.
4) Menentukan cara untuk menilai hasil pelaksanaan kurikulum yang berupa proses pembelajaran.

c. *Hilda Taba (1962)*

Teori yang dikemukakan oleh Hilda Taba tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan oleh Ralp Tyler, hanya saja ahli ini membuat deretan kegiatan sebagai rincian untuk masing-masing tahapan, sehingga memperjelas bagi para pelaksana dalam mengembangkan pelaksanaan pengembangan kurikulum.

d. *Harold B. Alberty (1962)*

Berbeda dengan Tayler dan Hilda Taba yang mengemukakan kurikulum dalam dalam bentuk langkah-langkah pengembanganya saja, Alberty mengemukakan sebagai unsur penting dalam pengembangan kurikulum adalah sumber belajar yang disebut dengan istilah *resource* unit.

e. *David Warwick (1975)*

Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh David Warwick adalah model pengembangan kurikulum dengan langkah-

langkah yang langsung berbicara tentang materi, tidak mulai dari perumusan tujuan.

f. *Evelina M. Vicencio (1995-1996)*

Ahli ini mengemukakan adanya 4 (empat) tahapan dalam pengembangan kurikulum, yaitu (1) *designing-merancang,* (2) *planning-merencanakan,* (3) *implementing-penerapan, dan* (4) *evaluating-mengevaluasi*.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, teori pengembangan kurikulum sebelum abad ke-20 pada umumnya bukan hanya bagaimana materi pelajaran disusun, tetapi bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan dalam bentuk strategi pembelajaran atau cara-cara dan metode penyampaiannya kepada peserta didik. Adapun teori yang telah tampak implementasinya adalah teori yang dikemukakan oleh Evelina M. Vicencio.

3. Dasar – Dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik, maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional.

Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam

penyususnan dan pengembanganya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Faktor Peserta Didik

Menurut teori psikologi perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Oleh karenanya dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama tersebut.

Selain mempertimbangkan tempo dan irama perkembangan peserta didik, sekurang-kurangnya ada lima asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu :

1) Asas psikologis
2) Asas pedagogis
3) Asas sosiologis
4) Asas psikologi belajar
5) Asas organisatoris.

b. Faktor Materi Pelajaran

Berkenaan dengan materi pelajaran, Schubert dalam bukunya *Curriculum, Perspective, Paradigm, and Passibility*, menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan jaman, dengan demikian kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik.

c. Faktor Pendidik

Peran Guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu maka faktor ini tidak bisa diabaikan manakala menyusun dan mengembangkan kurikulum.

d. Faktor pendekatan dan cara mendidik

Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Oleh karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. (https://www.paklativi.com/2018/01/dasar-dasar-pertimbangan-dalam-pengembangan-kurikulum.html diunduh 5 Desember 2022 pukul 13:13)

4. Tujuan dari Kurikulum

Tujuan dari kurikulum, yaitu :

a. *Curriculum Aims, Goals and Objectives*

A formal curriculum is embedded in a formal institution called schools. Schools are established institution which are either run by the government or by the private sector. The Philippine educational system is divided in three educational levels : primary, secondary and tertiary levels. Based on the Philippine Constitution of 1987, all school shall aim to :

1) *Inculcate patriotism and nationalism*

2) *Foster love of humanity*

3) *Promote respect for human [rights*

4) *Appriciate the role of national heroes in the historical development of the country*

5) *Teach the rights and duties of citizenship*

6) *Strengthen ethical and spiritual values*

7) *Develop moral character and personal discipline*

8) *Encourage critical and creative thinking*

9) *Broaden scientific and technological knowledge and promote vocational efficiency.*

b. *Aims of Elementary Education (Education Act of 1982)*

In the elementary level, schools through their curricula should aim to :

1) *Provide knowledge and develop skills, attitudes, values essential to personal development and necessary for living in and contributing to a developing and changing society.*

2) *Provide learning experiences which increase the child's awareness of and responsiveness to the change in the society*

3) *Promote and intensify knowledge, identification with and love for the nation and the people to which he belongs*

4) *Promote work experience which develop orientation to the world of work and prepare the learner to engage in honest and gainful work.*

c. *Aims of Secondary Education*

In high school or secondary level, educational curricula aim to :

1) *Continue to promote the objectives of elementary education ; and*
2) *Discover and enhance the different aptitudes and interest of students in order yo equin them with skills for productive, endeayor and or to prepare them for tertiary schooling*

d. *Aims of Tertiary Education*

Tertiary education refers to college an university formal education based on the curricula of the different courses. The different courses should aim to ;

1) *Provide generak education programs which will promote national identity, cultural consciousness, moral integrity and spiritual vigor*
2) *Train the nation's manpower in the skills required for national development*
3) *Develop the professions that will provide leadership for the nation and*
4) *Advance knowledge through research and apply new knowledge for improving the quality of human life and respond effectively to changing society.* (Purita P. Bilhao, dkk, 2016, h.17).

C. Kurikulum Islam Terpadu

1. Pengertian Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu (SIT) yaitu sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep

operasional Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. (TIM JSIT Indonesia, 2017, h.3).

Istilah "Terpadu" dalam Sekolah Islam Terpadu (SIT) dimaksudkan sebagai penguat (tauhid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah, Islam yang utuh menyeluruh, dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya berupa pemahaman formal dalam lingkungan sekolah tapi mencontohkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konatif. Implikasi dari keterpaduan ini menuntut pengembangan pendekatan proses pembelajaran yang kaya, variatif dan menggunakan media serta sumber belajar yang luas dan luwes. Metode pembelajaran menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Dengan pengertian ini, seharusnya pembelajaran di Sekolah Islam Terpadu (SIT) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:

a. *Problem solving* yang melatih peserta didik berpikir kritis, sistematis, logis dan solutif;
b. Berbasis kreativitas yang melatih peserta didik untuk berpikir orisinal, luwes (fleksibel) dan lancar dan imajinatif. Keterampilan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan penuh maslahat bagi diri dan lingkungannya.

Dengan sejumlah pengertian di atas, dapatlah ditarik suatu pengertian umum yang komprehensif bahwa Sekolah Islam Terpadu (SIT) adalah Sekolah Islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan keterlibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan orang tua, serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi peserta didik.

2. Konsep Kurikulum Islam Terpadu

Dalam kurikulum Sekolah Islam Terpadu, tetap berkiblat pada Kurikulum 2013 yang merupakan acuan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Namun sekolah melakukan pengembangan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pendidikan.

Dalam aplikasinya, Sekolah Islam Terpadu menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam.

Pelajaran umum, seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Jasmani/kesehatan, Keterampilan dibingkai dengan pijakan, pedoman dan panduan Islam. Sementara dalam pelajaran agama, kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan kemanfaatan, dan kemaslahatan.

In the context of organizing, Islamic Education curriculum is based on the values of the multicultural society tends to use the organizing of a eclectic, which is divided into five subject groups, namely :

a. *Aqeeda and Akhlaq.*

b. *Fiqh.*

c. *The history of Islamic culture.*

d. *The Qur'an and Hadith*

e. *Arabic.*

Thus the process of organizing the curriculum Islamic Education should be modeled on the interdisciplinary curriculum approach due to the unexpected cause to the dichotomy impression among lesson materials Islamic Education. This means that each subject Islamic Education has close ties. In its development organizing curriculum using multi-disciplinary approach. (Mohammad Mizan Habibi, 2017, h.43).

Berdasarkan Kurikulum Islam Terpadu yang dijabarkan diatas maka peneliti menyusun variabel dan indikator Implementasi Kurikulum Islam Terpadu yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Variabel dan Indikator Implementasi Kurikulum Islam Terpadu

No	Variabel	Indikator
1	Profil Kurikulum Islam Terpadu	1.1. Pengertian Sekolah Islam Terpadu 1.2. Prinsip Sekolah Islam Terpadu 1.3. Misi dan Tujuan Pendidikan Sekolah Islam Terpadu 1.4. Strategi Sekolah Islam Terpadu

2	Standar Isi Kurikulum Islam Terpadu	3.1 Kurikulum yang menjadi kekhasan Sekolah Islam Terpadu (SIT)
3	Standar Proses Kurikulum Islam Terpadu	4.1 Perencanaan Pembelajaran 4.2 Proses Pembelajaran 4.3 Pengelolaan Kelas 4.4 Penilaian Pembelajaran 4.5 Perangkat Pembelajaran
4	Standar Penilaian Kurikulum Islam Terpadu	4.1 Evaluasi Hasil Pembelajaran

Sumber : TIM Mutu Standar JSIT, 2017

3. Kurikulum Sekolah Islam Terpadu pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Mata Pelajaran Ekonomi

Kurikulum yang menjadi kekhasan Sekolah Islam Terpadu (SIT). Kekhasan itu mencerminkan pengembangan, baik perluasan maupun pendalaman dari kurikulum nasional yang berlaku sesuai dengan semangat memajukan pendidikan di Indonesia. Pengembangan yang dimaksud dalam standar isi tertera dalam kolom paling kanan yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada.

D. Standar Mutu JSIT

1. Standar Isi

Pada bagian standar isi ini, hanya disampaikan kurikulum yang menjadi kekhasan Sekolah Islam Terpadu (SIT). Kekhasan itu mencerminkan pengembangan, baik perluasan maupun pendalaman dari kurikulum nasional yang berlaku sesuai dengan semangat memajukan pendidikan di Indonesia. Pengembangan yang dimaksud dalam standar isi tertera dalam kolom paling kanan yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan

kompetensi dasar yang ada. Adapun Mata Pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas, yaitu :

1) Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dari Kelas X-XII
2) Mata Pelajaran Biologi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dari Kelas X-XII
3) Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dari Kelas X-XII
4) Mata Pelajaran Kimia untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dari Kelas X-XII
5) Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dari Kelas X-XII
6) Mata Pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dari Kelas X-XII
7) Mata Pelajaran Geografi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dari Kelas X-XII

2. Standar Proses

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang didesain dan diselenggarakan oleh para guru dalam rangka mencapai kompetensi lulusan. Standar proses juga mengacu pada Permendiknas yang mengatur tentang standar proses seperti Permendiknas No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

Selain mengacu pada ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku, JSIT juga mengembangkan standar proses yang mengacu pada kekhasan JSIT. Standar proses ini didasari pada prinsip pembelajaran Sekolah Islam Terpadu (SIT) yaitu Sajikan, Internalisasikan, dan Terapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sajikan
b. Internalisasikan
c. Terapkan

Ruang Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi :

a. Perencanaan pembelajaran
b. Proses pembelajaran
c. Pengelolaan kelas
d. Penilaian pembelajaran
e. Perangkat pembelajaran
f. Pembelajaran berbasis TIK

Dalam proses pembelajarannya, SIT menggunakan pendekatan pembelajaran TERPADU dengan uraian sebagai berikut:

a. Telaah artinya mengkaji konsep-konsep dasar materi melalui aktivitas Tadabbur dan Tafakur.
b. Eksplorasi artinya melakukan aktivitas menggali pengetahuan melalui beragam metode dan pendekatan pembelajaran.
c. Rumuskan artinya menyimpulkan hasil eksplorasi dengan berbagai bentuk penyajian.
d. Presentasikan artinya menjelaskan atau mendiskusikan rumusan hasil.

e. Aplikasikan artinya menerapkan hasil pembelajaran yang didapat untuk memecahkan masalah dan mengaitkan dengan bidang yang relevan.

f. Duniawi artinya mengaitkan hasil pembelajaran yang didapat dengan kehidupan nyata.

g. Ukhrawi artinya menghubungkan hasil pembelajaran yang didapat dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah SWT.

Tahapan dalam standar proses kurikulum islam terpadu :

a. Perencanaan Pembelajaran

Guru merancang pembelajaran dengan memperhatikan prinsip pembelajaran Sekolah Islam Terpadu (SIT) dan pendekatan pembelajaran TERPADU. Hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran sebagai berikut:

1) Analisis Kurikulum
2) Silabus
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

b. Proses Pembelajaran

1) Kegiatan Awal
2) Kegiatan inti
3) Kegiatan akhir

c. Pengelolaan Kelas

1) Lingkungan Kelas
2) Pembiasaan Ibadah Dan Adab Islami
3) Komunikasi guru dan peserta didik

d. Penilaian Pembelajaran

e. Perangkat Pembelajaran

1) Media pembelajaran

2) Modul

3) Lembar kerja peserta didik atau worksheet

4) Buku Teks Pelajaran

3. Standar Penilaian

Standar penilaian pada SIT mengacu pada ketentuan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. JSIT Indonesia melakukan pengembangan dengan kekhasan SIT yang dimiliki tanpa keluar dari ketentuan dalam Permendikbud tersebut.

a. Tujuan dan fungsi penilaian

1) menilai pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik

2) memperbaiki proses pembelajaran

3) sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar peserta didik

4) mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik

5) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik

6) memberikan umpan balik/ perbaikan proses pembelajaran

7) memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan.

8) menentukan kenaikan kelas

b. Fungsi penilaian hasil belajar

1) bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas

2) umpan balik dalam perbaikan proses pembelajaran
3) meningkatkan motivasi belajar peserta didik
4) pengembangan sistem instruksional dan
5) evaluasi diri terhadap kinerja guru

E. Mata Pelajaran Ekonomi

"Economics is a social science that focuses on the production, distribution, and consumption of goods and services, and analyzes the choices that individuals, businesses, governments, and nations make to allocate resources". (Adam Hayes, 2022, h.1).

Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang cara seseorang memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.

Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang diberikan di sekolah menengah atas (SMA), mata pelajaran ekonomi yang menggunakan kurikulum 2013, setiap peserta didik untuk aktif mencari informasi agar tidak ketinggalan mengikuti materi pembelajaran. (Mulyono, 2013, h.20).

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. (Raharja, 2016, h.2)

Mata pelajaran ekonomi adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berekonomi, dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep dan teori serta. berlatih memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat.(Somantri,2013, h.22).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi adalah mata pelajaran yang diberikan di sekolah menengah atas (SMA), yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya, serta mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berekonomi, dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep dan teori serta berlatih memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. (https://repository.unsri.ac.id/1824/1/RAMA_87203_%2006031181419064_0020126401_0022086402_02.pdf)

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Nurdiaman (2015) dengan judul **"Studi Implementasi Kurikulum Islam Terpadu Sesuai Standar Mutu JSIT di SMP IT Al-Multazam Kabupaten Kuningan"**. Hasil penelitian menunjukan bahwa wawasan guru, implementasi kurikulum dan standar mutu JSIT sangat baik dengan presentasi sesuai dengan yang diharapkan. (1) wawasan guru tentang kurikulum 2006 dalam kontek SIT dan pengembangannya sangat baik, ini dibuktikan dengan keterlibatan guru-guru pengembangan kurikulum SIT. (2) Implementasi kurikulum 2006 dalam konteks dibuktikan dengan pengembangan kekhasan dalam setiap mata pelajaran dan proses pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi yang sesuai dengan kurikulum SIT (3) penilaian kesesuaian standar mutu nampak terlihat dari wawasan

guru, proses implementasi, kegiatan yang diselenggarakan dan berupa dokumen Rencana Kerja Tahunan, Buku I dan II Kurikulum SMPIT Al-Multazam serta *best practice* implementasi kurikulum JSIT yang sesuai dengan standar mutu JSIT. Dan pandangan umum tentang SMPIT Al-Multazam bahwa semua civitas akademika SMPIT Al-Multazam dalam menyusun dan mengembangkan konsep pendidikan yang Islami telah menjelma dengan kemajuan yang dirasakan. Pada prinsipnya SMPIT Al-Multazam Kuningan menerapkan Kurikulum 2006 sebagai kurikulum nasional dengan menambahkan kekhasan sebagimana konsep kurikulum SIT. Konsep operasional SMP IT Al-Multazam merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Daya dukung yakni SDM yang profesional mampu membangun dan mengembangkan tatanan konsep pendidikan yang diterapkan oleh SMPIT Al-Multazam.

2. Penelitian selanjutnya adalah tesis yang dilakukan oleh Darajat, Sayuti (2010) dengan judul **"Studi Evaluatif Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Program Pendidikan Terrpadu: Studi Kasus Di SMP Islam Terpadu Al-Izzah Serang Banten".** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen kurikulum yang dibuat guru sesuai dengan implementasinya namun ada beberapa hal yang sedikit keluar dari RPP. Oleh karena itu, dapat direkomendasikan kepada kepala sekolah untuk mempertahankan dan meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum PAI serta mengatasi kekurangan

dalam implementasi dan kepada guru untuk terus melakukan pendalaman terhadap kurikulum agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

3. Penelitian selanjutnya juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muher (2021) dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Guru, Pengalaman Dan Pelatihan Terhadap Implementasi Kurikulum 13 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Di Kota Pekanbaru".** Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Variabel bebas yaitu kompetensi, pelatihan, dan pengalaman mengajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu implementasi kurikulum 13 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di kota Pekanbaru. Pengaruh tersebut sebesar 76,5%, sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini.

4. Penelitian berikutnya yaitu penelitian tesis yang dilaksanakan oleh Arpan Marwazi (2016) dengan judul **"Implementasi Kurikulum Terpadu dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Husnayain Pidoli Dolok Mandailing Natal".** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Proses Implementasi Kurikulum Sekolah Islam Terpadu dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Husnayain Pidoli Dolok dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 2) Upaya

yang dilakukan Pendidik dan Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Sekolah Islam Terpadu dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Husnayain Pidoli Dolok melalui pengambilan keputusan partisipatif, sosialisasi memperhatikan fasilitas dan sumber belajar yang perlu dikembangkan dalam mendukung suksesnya implementasi kurikulum serta tenaga pengelola dan peningkatan kemampuan pengelolanya. 3) Faktor pendukung implementasi Kurikulum Islam Terpadu dalam peningkatan mutu pendidikan agama islam di SMPIT Al-Husnayain Pidoli Dolok adalah tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya, sarana dan prasarana yang menunjang, kedisiplinan siswa dan mayoritas siswa beragama islam. Sedangkan penghambatnya adalah kemampuan dan jiwa psikologis siswa yang berbeda-beda. Guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan implementasi Kurikulum Islam Terpadu.